

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Kartasapoetra, G. *Hukum Tanah; Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Abdul Nasution, Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*. Ed pert. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2017
- Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Maria S.W. Sumardjono. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Parlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1988.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Salim H.S. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Soedharyo Soimin. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1986.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2014.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2005

Kartasapoetra. G, *Hukum Tanah; Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*; Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram*: University Perss, 2020.

Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, 2nd ed.* Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.

Susiani Dina MH, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Sukoharjo: Tahta Media Grup, 2024.

Anggara And Sahya, *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Galang Asmara at al, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2025.

Asshiddiqie Jilmy, *Hukum Tatanegara dan Administrasi Negara di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

### **Jurnal Ilmiah**

Anata Lubis. "Akibat Hukum Pencatatan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah." *Jurnal UMSU* 2, no. 2 (2023): 242–52.

Anisa Sekarsari. "Pelaksanaan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah." *Jurnal Tunas Agraria* 2, no. 2 (2019): 117–35. A Tehupeiorry. "Pengakuan Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Pada Akta Digital." *Jurnal Hukum Kenegaraan* (2018): 3–4.

Amanda Silvi Insani. "Tinjauan Yuridis Tentang Pemblokiran Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal Bevinding* 02, no. 03 (2024): 23–38.

Arsyani Hartawan, Frisca. "Kerugian Terhadap Pemilik Sertifikat Akibat Pencatatan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah oleh BPN Tanjung Jabung Barat." *Jurnal Universitas Jambi* 5 (2024): 467–74.

Azmi Maulani. "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah terhadap Pemblokiran Sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal." *Jurnal* (2023): 31–34.

Cintya Anindita, Katarina Dewi. "Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman." *Jurnal* (2020): 8–9.

Khaidar Abdan Syakuran. "Pemblokiran Sertifikat Tanah Sebagai Bentuk Wanprestasi Jual Beli Tanah." *Jurnal MHI* 2, no. 4 (2024): 7.

Liem, Ronald. "Peran Kantor Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah." *Jurnal Hukum Transparansi* 4, no. 1 (2023): 35–50.

- Mulyanto, E.D.I. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Adanya Pemblokiran Sertifikat.” *Jurnal* (2021): 10.
- Parlindungan, A.P. “Pendaftaran Tanah-Tanah dan Konfersi Hak Milik atas Tanah Menurut UUPA.” *Jurnal* (1988): 57–58.
- Prasetyo, Agung Basuki, dan Ria Ayu Novita. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).
- Redy Savendra Sihaloho. “Pelaksanaan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum.” *Jurnal Notarius* 12, no. 2 (2019): 550–65.
- Rangkasa, Edgar. “Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal al Lex Librum* IV, no. 1 (2017).
- Sitorus, Oloan. “Kekuatan Hukum Pemblokiran Sertipikat Tanah oleh BPN dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah.” *Jurnal Yuridika* 35, no. 1 (2020): 1–20.
- Yusman, Muhammad & Syofian Angga Fahlan. “Konstruksi Hukum Penguasaan Tanah Sebagai Dasar Pemberian Hak Milik Kajian Terhadap Peraturan PTSL.” *Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 278.
- Saludik dan E. Sumitro, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Luar Pengadilan.” *Jurnal Ilmu Hukum* no, 5 (2022): 738-754
- Mustari Sartika, dan Syahrudin, et al. “Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah.” *Jurnal Legislasi dan Pengembangan* 5, No. 2 (2023): 12-13
- Putri Annisa, “ Reformasi Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Administrasi Pertanahan di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2, (2018): 245.
- Kurniawan Agus, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Pendaftaran Tanah Pasca Purusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Lus Quia Lustum*, Vol. 22, No. 3 (2015): 495-515.

### **Skripsi dan Tesis**

- Adlila, Iqlima. *Analisis Yuridis Pemblokiran Sertifikat Tanah yang Menjadi Objek Sengketa*. Skripsi, UIN Bandung, 2022.
- Asharian, Besse Ayu. *Tinjauan Hukum Terhadap Pemblokiran Sertifikat Hak Atas Tanah pada Kantor BPN*. Skripsi: Universitas Muslim Indonesia, 2022.
- Cintya Anindita, Katarina Dewi. *Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Atas Tanah*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Eva Hanora. *Pelaksanaan Pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru*. Skripsi, STPN Yogyakarta, 2015.
- Maulani, Azmi. *Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah terhadap Pemblokiran Sertifikat*. Skripsi, UNISULLA, 2023.
- Mulyanto, E.D.I. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas*

*Tanah*. Skripsi, Universitas Sultan Agung, 2021.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/Pdt/1999.

### **Website / Media Daring**

Dedi Haryadi. "Sertifikat Warga Jl Ampera Diblokir BPN Selama 13 Tahun, Lakukan Gugatan ke PTUN Bandung." *Radar Cirebon*, 22 Oktober 2025.

Fanny Crisna Matahari. "13 Tahun Tanpa Kepastian, Warga Ampera Cari Jalan Keluar." *Kabar Cirebon*, 23 November 2025.

Pemerintah Kota Cirebon. Diakses 7 Januari 2026.

Subekti Riant, "Sertipikat Tanah Warga Ampera Kota Cirebon Diblokir, Warga Desak BPN Segera Buka," *INews Cirebon*, 7 September 2025.

Dede Adhitama, "Buntut 65 Sertipikat diblokir BPN, Warga Ampera Gugat bpn Hingga KDM." *Rakyat Cirebon*, 26 April 2025

### **Wawancara**

Asep Taryana, Ketua RW 02 Gunung Sari Dalam. Wawancara oleh penulis, Cirebon, 13 Januari 2026.

Izzuddin, Sekretaris Lurah Pekiringan, Kec. Kesambi Kota Cirebon. Wawancara oleh penulis, Cirebon, 13 Januari 2026.

Abdul Bashit, Administrasi Perkantoran pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Wawancara oleh penulis, Cirebon, 30 Januari 2026.